

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TOLAI TIMUR MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Moh. Nopriady, Andi Pasinringi, H. Sasterio

nopriady@gmail.com

Program Studi Magister administrasi publik pascasarjana universitas tadulako

Abstract

The theoretical foundation used is Isbandi Rukminto Adi (2018) to see community empowerment by using four indicators namely training, training, planning, and evaluation. This type of research is Qualitative Descriptive which attempts to tell and pour data that is pleasing to the facts, using purposive methods, data gathering and discussion using qualitative analysis to collect data and materials obtained through observation and interviews with the number of 5 (five) informants. Based on the interviews, it was found that the empowerment of the Tolai Timur Village community through Village-Owned Enterprises (BUMDes) had not run optimally. This is related to the stages of planning and planning that run optimally, but planning evaluation and planning runs by maximum community resources to conduct an assessment of the suitability of community empowerment programs through BUMDes involved in planning and improvement with support for improving community welfare in Tolai Timur Village.

Keywords: *Preparation, Planning, Assessment, Evaluation*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara keempat yang paling padat penduduknya, setelah Cina, India, Amerika Serikat dengan estimasi penduduk Indonesia yang pada tahun 2008 adalah 228,4 juta dengan pertumbuhan penduduk 1,34% per tahun (Badan Pusat Statistik, 2010). Indonesia merupakan salah satu negara yang masih negara berkembang di Asia. Terdapat anggapan bahwa negara yang sedang berkembang identik dengan kemiskinan. Jadi apabila ada suatu negara yang sedang berkembang maka di dalam negara itu terdapat kemiskinan dimanamana. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum. Hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan juga berarti tidak memiliki akses pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah.

Tanggung jawab utama dalam program pembangunan adalah masyarakat berdaya atau

memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Kemampuan berdaya mempunyai arti yang sama dengan kemandirian masyarakat. Terkait dengan program pembangunan, bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material.

Kemandirian masyarakat dapat dicapai tentu memerlukan sebuah proses belajar. Masyarakat yang mengikuti proses belajar yang baik, secara bertahap akan memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri. Berkaitan dengan hal ini, Sumodiningrat (2000) menjelaskan bahwa keberdayaan masyarakat yang ditandai adanya kemandiriannya dapat dicapai melalui proses pemberdayaan masyarakat. Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya. Secara sosial, masyarakat sekitar kawasan hutan lindung sampai saat ini tetap teridentifikasi sebagai masyarakat marginal (terpinggirkan) dan tidak memiliki daya, kekuatan, dan kemampuan yang dapat diandalkan serta tidak memiliki modal yang memadai untuk bersaing dengan masyarakat kapitalis atau masyarakat pengusaha yang secara sosial dan politik memiliki daya, kekuatan, dan kemampuan yang memadai.

Ketidakberdayaan masyarakat secara sosial dan ekonomi menjadi salah satu ganjalan bagi masyarakat untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan sesama saudaranya yang telah berhasil. Kondisi inilah yang perlu dipahami dan dijadikan salah satu pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan penyusunan program, agar setiap kebijakan dan program tentang pengaturan pengelolaan hutan yang diambil tetap memperhatikan kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan lindung. Paradigma perencanaan

pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat yang sentralistik dimana program dirancang dari atas tanpa melibatkan masyarakat, harus diubah kearah peningkatan partisipasi masyarakat lokal secara optimal. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu pelimpahan atau pemberian kekuatan (*power*) yang akan menghasilkan hierarki kekuatan dan ketiadaan kekuatan, seperti yang dikemukakan Simon (1993) bahwa pemberdayaan merupakan suatu aktivitas refleksi, suatu proses yang mampu diinisiasikan dan dipertahankan hanya oleh agen atau subyek yang mencari kekuatan atau penentuan diri sendiri (*self-determination*).

Sulistiyan (2004) menjelaskan lebih rinci bahwa secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahannya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri. Pranarka dan Vidhyandika (1996) menjelaskan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya

terhadap pelaku pemberdayaan yang memiliki kemampuan yang memadai semakin menguat. Pelaku pemberdayaan tidak hanya dituntut untuk memperkaya pengetahuannya, melainkan mereka dituntut meningkatkan keterampilannya dalam mendesain program pemberdayaan. Lantas muncul pertanyaan, kemampuan seperti apa yang harus dimiliki oleh pelaku pemberdayaan. Huseini (1999) menjelaskan bahwa modal manusia merupakan refleksi dari pendidikan, pengalaman, intuisi dan keahlian. Era globalisasi yang menuntut perhatian terhadap modal manusia semakin tinggi, terkait dengan perkembangan dalam ilmu ekonomi pembangunan dan sosiologi. Para ahli kedua bidang tersebut umumnya sepakat pada satu hal, yakni modal manusia berperan secara signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi, dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Modal manusia (human capital) tersebut tidak hanya menyangkut kuantitas tetapi juga kualitas. Berdasarkan beberapa definisi modal manusia yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa modal manusia (human capital) adalah suatu aset yang berhubungan dengan intelektualitas dan kondisi seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal dan nonformal yang didukung oleh kesehatan jasmani dan rohani yang prima dan kemampuan melakukan hubungan/interaksi antarsesama secara baik, menguntungkan, dan berkelanjutan. Penting juga diketahui bentuk transaksi yang dalam teori ekonomi dianggap sebagai nonekonomi karena tidak dapat secara langsung memaksimalkan keuntungan material. Padahal sebenarnya dalam setiap transaksi modal ekonomi selalu disertai oleh modal immaterial berbentuk modal budaya dan modal sosial.

Masalah pembangunan merupakan masalah yang kompleks. Kompleksitas itu misalnya dari sisi manajemen berarti perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dari sisi bidang yang harus dibangun juga memiliki aspek kehidupan yang sangat luas. Aspek kehidupan

itu mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Dalam manajemen pemerintahan yang otoriter yang sentralistis, dalam realitas masyarakat lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan. Ketika kini pemerintahan yang demokratis yang hendak dikembangkan, maka ada perubahan posisi masyarakat yang semula lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan. Memposisikan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan agar bersifat efektif perlu dicarikan berbagai alternatif strategi pemberdayaan masyarakat. Pilihan strategi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Konsep pemberdayaan berpangkal dari asumsi hubungan yang setara antar semua elemen masyarakat dan negara. Dalam konteks pemberdayaan, semua unsur desa berada dalam posisi setara, yang tumbuh bersama dan saling mengisi. Masing-masing elemen harus memahami dan menghargai kepentingan maupun perbedaan satu sama lain. Pemberdayaan tersebut dimaksudkan agar masing-masing unsur dapat meningkatkan kemampuannya, semakin kuat, semakin mandiri, serta memainkan tugasnya masing-masing. dalam hal pemberdayaan, tidak dikenal unsur satu lebih kuat daripada yang lainnya. Unsur-unsur yang lebih kuat hanya memainkan tugas sebagai fasilitator untuk memudahkan unsur-unsur yang lain memberdayakan dirinya sendiri. Untuk melaksanakan tugasnya dalam pemberdayaan masyarakat desa, para pekerja atau fasilitator harus profesional, memiliki kemampuan dan keterampilan terkait. Setiap unsur harus kompeten, mempunyai kemampuan dalam memahami teori dan bertindak praktis, serta dapat membuat refleksi (Suyanto, 2009).

Pemberdayaan masyarakat desa Tolai Timur di Kabupaten Parigi Moutong telah banyak dilakukan oleh pemerintah desa tersebut, salah satunya melalui program unit simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Beberapa penelitian terdahulu

memberikan gambaran bahwa program pemberdayaan tersebut belum berjalan optimal. Program tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk nyata pemberdayaan yang dilakukan selama ini seperti pembinaan dan pelatihan perkoperasian namun semuanya ini belum berjalan secara optimal. Untuk merumuskan kebijakan pengembangan program pemberdayaan yang telah dilakukan maka hal utama yang perlu dilakukan adalah mendapatkan gambaran tentang sejauh mana program pemberdayaan yang telah dijalankan, untuk itu perlu dilakukan penelitian ini dengan judul “Pemberdayaan masyarakat Desa Tolai Timur melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Parigi Moutong”.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai *setting social* atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Tujuan utama peneliti dalam melakukan penelitian deskriptif ialah untuk menggambarkan situasi atau objek dalam fakta yang sebenarnya, secara sistematis dan karakteristik dari subjek dan objek tersebut diteliti secara akurat, tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat sering kali sulit dibedakan dengan pembangunan masyarakat karena mengacu pada pengertian yang tumpang tindih dalam penggunaannya di

masyarakat. Dalam kajian ini pemberdayaan masyarakat dimaksudkan sebagai pemberdayaan masyarakat yang sengaja dilakukan pemerintah khususnya pemerintah desa untuk memfasilitasi masyarakat desa dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya berkaitan erat dengan *sustainable development* yang membutuhkan pra-syarat keberlanjutan kemandirian masyarakat secara ekonomi, ekologi dan sosial yang selalu dinamis.

Sejatinya, pemberdayaan masyarakat harus melibatkan berbagai potensi yang ada dalam masyarakat, beberapa elemen yang terkait, misalnya peranan Pemerintah dalam artian birokrasi pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan misi ini, mampu membangun partisipasi, membuka dialog dengan masyarakat, menciptakan instrument peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat bawah. Organisasi-organisasi kemasyarakatan diluar lingkungan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kemasyarakatan nasional maupun local. Lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan didalam masyarakat itu sendiri seperti BPD, PKK, Karang Taruna dan sebagainya.

Selanjutnya, suatu pengukuran dalam evaluasi terkait dengan upaya untuk melakukan optimalisasi pemberdayaan masyarakat Desa Tolai Timur melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Parigi Moutong. Untuk mengoptimalkan kinerja pegawai melalui perencanaan pengembangan sumber daya manusia, maka dibutuhkan evaluasi terlebih dahulu terkait teknik dalam melakukan evaluasi perencanaan sumber daya manusia. Untuk mengkaji lebih jauh tentang perencanaan pemberdayaan

masyarakat Desa Tolai Timur melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Parigi Moutong, maka berikut ini adalah empat indikator tentang pemberdayaan masyarakat desa yang dikemukakan oleh Isbandi Rukminto Adi (2018), yaitu: 1) Tahap Persiapan, pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu, pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community woker*, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif; 2) Tahap pengkajian (*assessment*), pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompokkelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki klien; 3) Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan; 4) Tahap evaluasi, evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan Persiapan dan Pemformulasian rencana aksi warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam sub-bab berikut ini.

Tahap Persiapan

Tahap Persiapan, pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu, pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga

pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community woker*, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif. Selanjutnya, pada tahapan persiapan adalah kegiatan sebelum memulai program kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa oleh pemerintah Desa Tolai Timur. Pada tahap persiapan ini menyusun rangkaian atau kerangka kegiatan yang akan dilakukan dengan tujuan agar waktu dan pekerjaan yang akan dilakukan bisa efektif. Untuk lebih jelasnya, terkait dengan tahap persiapan dalam pemberdayaan masyarakat Desa Tolai Timur melalui Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Parigi Moutong dapat dilihat dalam hasil wawancara berikut ini.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Tolai Timur, I Made Sukanto, menyatakan bahwa:

“Dalam proses pemberdayaan masyarakat yang kami lakukan di desa ini untuk tahapan persiapan, kami anggap sudah berjalan dengan baik karena kami sudah merancang dengan bersama masyarakat untuk kelancaran dan kesesuaian program yang kita jalankan” (Wawancara dilakukan pada tanggal 18 April 2019)

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Tolai Timur, I Wayan Bonefasus, menyatakan bahwa:

“Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, saya selaku sekretaris desa menganggap bahwa dalam proses tahapan persiapan telah berjalan dengan maksimal karena kami telah merundingkan terlebih dahulu kemudian kami sampaikan kepada masyarakat secara bersama” (Wawancara dilakukan pada tanggal 18 April 2019)

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tolai Timur, I Wayan Wartika, menyatakan bahwa:

“Sudah Pak, sudah sesuai dan sudah maksimal terkait dengan tahap persiapan” (Wawancara dilakukan pada tanggal 18 April 2019)

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan Desa Tolai Timur, Edi Susanti, SE., menyatakan bahwa:

“Pemerintah desa telah melakukan persiapan dengan baik dan maksimal karena pada tahapan awal ini, kami selaku pemerintah desa telah mengundang masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam rangka untuk menentukan program yang sesuai dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes” (Wawancara dilakukan pada tanggal 18 April 2019)

Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Tolai Timur, I Nyoman Ade, menyatakan bahwa:

“Kami sebagai masyarakat menyampaikan bahwa pemerintah Desa Tolai Timur telah melakukan tahapan persiapan dengan maksimal, karena dasar yang kami jadikan acuan adalah mereka mengajak kami untuk berdiskusi dalam membahas mengenai program awal terkait pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes” (Wawancara dilakukan pada tanggal 18 April 2019)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa tahapan persiapan dalam pemberdayaan masyarakat Desa Tolai Timur melalui Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Parigi Moutong telah berjalan dengan maksimal. Hal tersebut disebabkan bahwa pemerintah desa telah melakukan kolaborasi dengan masyarakat dalam hal persiapan awal untuk menentukan dan menyepakati program yang sesuai dengan program pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengembangan BUMDES yang ada di Desa Tolai Timur diharapkan dapat ditindaklanjuti selanjutnya dengan membuat pendampingan dan pelatihan yang dapat menunjang berdirinya BUMDES yang baik. Tujuannya adalah menjadikan desa memiliki tingkat perekonomian mandiri yang baik. Untuk kedepannya, sebaiknya para akademisi atau pihak universitas memfasilitasi desa-desa untuk pengembangan lembaga yang ada di desa karena menurut pengamatan penulis, masih sangat jarang program-program yang bernuansa pengembangan manajemen

bagi lembaga di desa. Kegiatan yang cukup sering dilakukan di desa biasanya menasar sektor UMKM atau sektor usaha, padahal, lembaga seperti BUMDES juga memerlukan pembimbingan atau konsultasi dari pihak akademisi. Implikasi pendampingan ini berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terutama dalam mengembangkan kemampuan berusaha, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Temuan penelitian juga mampu menumbuhkan dan memupuk jiwa kewirausahaan bagi masyarakat desa serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap sebuah kebijakan.

Tahap Pengkajian

Tahapan pengkajian (*assessment*), pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki klien. Untuk lebih jelasnya terkait dengan tahap pengkajian dalam pemberdayaan masyarakat Desa Tolai Timur melalui Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Parigi Moutong dapat dilihat dalam hasil wawancara berikut ini.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Tolai Timur, I Made Sukanto, menyatakan bahwa:

“Untuk tahapan pengkajian, saya rasa Pak. Kami belum maksimal, karena didasari kurangnya pemahaman dalam hal ini kemampuan berupa sumberdaya yang mumpuni untuk menganalisa terkait dengan program kegiatan yang sesuai dan memiliki dampak serta manfaat yang positif berkelanjutan” (Wawancara dilakukan pada tanggal 18 April 2019)

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Tolai Timur, I Wayan Bonefasus, menyatakan bahwa:

“Belum maksimal, sesuai dengan penyampain dari Bapak Kepala Desa karena masih minim dan kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengembangkan konsep program yang sesuai dengan pemberdayaan masyarakat” (Wawancara dilakukan pada tanggal 18 April 2019)

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tolai Timur, I Wayan Wartika, menyatakan bahwa:

“Kekurangan sumberdaya di Desa kami menyebabkan, proses tahap pengkajian menjadi belum maksimal” (Wawancara dilakukan pada tanggal 18 April 2019)

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan Desa Tolai Timur, Edi Susanti, SE., menyatakan bahwa:

“Belum Pak, belum maksimal. Dibutuhkan adanya penambahan sumberdaya dan juga mekanisme proses pelatihan pengembangan pengetahuan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka mewujudkan sistem pemberdayaan yang maksimal” (Wawancara dilakukan pada tanggal 18 April 2019)

Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Tolai Timur, I Nyoman Ade, menyatakan bahwa:

“Kami selaku masyarakat, menyadari bahwa kami memiliki kekurangan sumberdaya sehingga belum dapat melakukan proses tahapan pengkajian dengan maksimal sebagai langkah evaluasi terhadap kegiatan program pemberdayaan masyarakat”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Tolai Timur melalui Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Parigi Moutong belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sumberdaya masyarakat untuk melakukan pengkajian terhadap kesesuaian program pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes yang berdampak luas dan positif serta berkelanjutan dalam rangka untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tolai Timur. Selanjutnya, dapat dipahami bahwa pemberdayaan merupakan kondisi proses yang dilakukan masyarakat melalui belajar sampai benar-benar memiliki kemampuan pada kondisi yang mandiri. Dengan harapan bahwa kemandirian mampu dilaksanakan dengan memelihara rasa persatuan, kebersamaan, dan memiliki motivasi tinggi sehingga kemandirian tersebut secara kontinyu dan tidak mengalami ketertinggalan. Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi: 1) Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri; 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan; 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan. Untuk lebih jelasnya terkait dengan tahap perencanaan dalam pemberdayaan masyarakat Desa Tolai Timur melalui Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Parigi Moutong dapat dilihat dalam hasil wawancara berikut ini.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Tolai Timur, I Made Sukanto, menyatakan bahwa:

“Untuk tahapan perencanaan, kami selaku pemerintah desa telah bekerja sama serta bersinergi dengan masyarakat untuk mewujudkan Badan Usaha Milik Desa dalam berjalan dengan baik dan programnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami telah melakukan musyawarah secara bersama untuk merencanakan dengan baik program-program yang nantinya akan dikembangkan” (Wawancara dilakukan pada tanggal 18 April 2019)

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Tolai Timur, I Wayan Bonefusus, menyatakan bahwa:

“Kami secara bersama-sama dengan masyarakat melakukan perencanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan serta melaksanakan program dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat” (Wawancara dilakukan pada tanggal 18 April 2019)

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tolai Timur, I Wayan Wartika, menyatakan bahwa:

“Bersama-sama masyarakat kami melakukan tahapan perencanaan dengan baik terkait dengan program BUMDes sesuai dengan kebutuhan masyarakat” (Wawancara dilakukan pada tanggal 18 April 2019)

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan Desa Tolai Timur, Edi Susanti, SE., menyatakan bahwa:

“Masyarakat menyadari bahwa mereka telah berpartisipasi penuh dalam rangka melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes” (Wawancara dilakukan pada tanggal 18 April 2019)

Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Tolai Timur, I Nyoman Ade, menyatakan bahwa:

“Kami selaku masyarakat sudah menyadari bahwa tahapan perencanaan telah berjalan dengan maksimal karena kami dilibatkan secara menyeluruh dalam diskusi untuk menentukan perencanaan program yang sesuai dalam kegiatan pemberdayaan

masyarakat melalui BUMDes” (Wawancara dilakukan pada tanggal 18 April 2019)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa tahapan perencanaan dalam proses pemberdayaan masyarakat Desa Tolai Timur melalui Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Parigi Moutong telah berjalan dengan maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh koordinasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah Desa Tolai Timur dengan masyarakat dalam kerangka kerjasama awal melalui proses tahapan perencanaan yang dilakukan secara bersama dan seksama melalui musyawarah dan mufakat. Dalam pemberdayaan masyarakat dibutuhkan peran petugas sebagai tenaga sumber daya manusia dalam masyarakat yang bertugas sebagai agen pembaharu sehingga kelompok-kelompok masyarakat itu dapat ikut serta, berperan, atau partisipasi dalam memberi solusi pemikirannya dalam mengatasi masalah serta mampu mengembangkan dalam rangka menumbuhkembangkan sikap warga untuk gotong royong dalam sebuah kelompok masyarakat, mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia sehingga terbangun komunikasi efektif sesama kelompok pemberdayaan masyarakat.

Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi, evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan Persiapan dan Pemformulasian rencana aksi warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Untuk lebih jelasnya terkait dengan tahap evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat Desa Tolai Timur

melalui Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Parigi Moutong dapat dilihat dalam hasil wawancara berikut ini.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Tolai Timur, I Made Sukanto, menyatakan bahwa:

“Pada tahap evaluasi ini juga kami menganggap belum maksimal berjalan dalam proses pemberdayaan masyarakat karena kami kurang memahami bagaimana cara melakukan evaluasi dengan maksimal, sehingga kami masih membutuhkan pelatihan” (Wawancara dilakukan pada tanggal 18 April 2019)

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Tolai Timur, I Wayan Bonefasus, menyatakan bahwa:

“Belum berjalan dengan maksimal Pak, karena kendala sumberdaya yang masih rendah dalam memahami mekanisme proses pemberdayaan masyarakat dengan maksimal” (Wawancara dilakukan pada tanggal 18 April 2019)

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tolai Timur, I Wayan Wartika, menyatakan bahwa:

“Sesuai dengan pernyataan pimpinan kami Pak, belum berjalan dengan maksimal Pak” (Wawancara dilakukan pada tanggal 18 April 2019)

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan Desa Tolai Timur, Edi Susanti, SE., menyatakan bahwa:

“Seperti yang kami pahami bahwa belum berjalan dengan maksimal Pak, karena kendala sumberdaya yang masih rendah dalam memahami mekanisme proses pemberdayaan masyarakat dengan maksimal” (Wawancara dilakukan pada tanggal 18 April 2019)

Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Tolai Timur, I Nyoman Ade, menyatakan bahwa:

“Kami selaku masyarakat menyadari belum memiliki pemahaman yang baik dalam proses melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut, maka sekiranya kami

menginginkan adanya pelatihan pengembangan kemampuan untuk memaksimalkan hal tersebut” (Wawancara dilakukan pada tanggal 18 April 2019)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pada tahapan evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat desa Tolai Timur melalui Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Parigi Moutong belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh karena kendala sumberdaya yang masih rendah dalam memahami mekanisme proses pemberdayaan masyarakat dengan maksimal khususnya pada tahapan evaluasi pada proses pelaksanaan program pemberdayaan tersebut. Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika, asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan, pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

Tahap persiapan dalam pemberdayaan masyarakat Desa Tolai Timur melalui Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Parigi Moutong telah berjalan dengan maksimal karena pemerintah desa telah melakukan kolaborasi dengan masyarakat dalam hal persiapan awal

untuk menentukan dan menyepakati program yang sesuai dengan program pemberdayaan masyarakat;

Tahap pengkajian dalam pemberdayaan masyarakat Desa Tolai Timur melalui Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Parigi Moutong belum berjalan dengan maksimal karena kurangnya sumberdaya masyarakat untuk melakukan pengkajian terhadap kesesuaian program pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes yang berdampak luas dan positif serta berkelanjutan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tolai Timur;

Tahap perencanaan dalam pemberdayaan masyarakat Desa Tolai Timur melalui Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Parigi Moutong telah berjalan dengan maksimal karena koordinasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah Desa Tolai Timur dengan masyarakat dalam kerangka kerjasama awal melalui proses tahapan perencanaan yang dilakukan secara bersama dan seksama melalui musyawarah dan mufakat;

Tahap evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat Desa Tolai Timur melalui Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Parigi Moutong belum berjalan dengan maksimal karena kendala sumberdaya yang masih rendah dalam memahami mekanisme proses pemberdayaan masyarakat dengan maksimal khususnya pada tahapan evaluasi pada proses pelaksanaan program pemberdayaan tersebut.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian tersebut, maka rekomendasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Tolai Timur sepatutnya untuk melakukan pengembangan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Secara spesifik bahwa perlu adanya upaya dalam rangka meningkatkan sumberdaya masyarakat baik berupa peningkatan pemahaman melalui program pelatihan untuk memaksimalkan proses pengkajian dan evaluasi sebagai bagian

dalam wujud pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengakui bahwa dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti telah banyak mendapat banyak bantuan, petunjuk, dan arahan dari Ketua Tim Pembimbing Dr. Andi Pasinringi, M.Si dan Anggota Tim Pembimbing Dr. H. Sasterio, M.Si. Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat dan mendorong lahirnya karya ilmiah yang lebih baik ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Public*. Yogyakarta: UGM Press.
- Al Jufri. 2013. *Analisis Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.
- Ambar. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anton Moeliono. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Arikunto, Suharsimi, 2007. *Manajemen Penelitian*. Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Arsyad, Lincoln. 2004. *Perencanaan Peningkatan Kinerja*. Edisi Keempat. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Isbandi Rukminto Adi. 2018. *Kesejahteraan Sosial*. Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali.
- Joewono, Heri. 2002. *Pokok-Pokok Pikiran Kepemimpinan Abad 21*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya